



# Universitas Gadjah Mada dalam Pusaran Konflik 1965

Willy Alfarius<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

\* E-mail: [willy.alfarius@gmail.com](mailto:willy.alfarius@gmail.com)

**Citation:** Alfarius, Willy "Dampak Peristiwa Gerakan 30 September 1965, di Universitas Gadjah Mada, 1965-1968". *Socio Historica* 2022, Vol. 1, No. 2. DOI:<https://doi.org/10.15408/sh.v1i2.27097>

**Publisher's Note:** Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This article discusses the impact of the September 30 Movement (G30S) 1965 incident on Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta. Exactly, this research takes a temporal limitation since it happened from early October 1965 until 1968 when the national political transition period can be said to have ended. In particular, this research outlines the university's response to the incident and the reasons for taking campus action against students and lecturers who were accused of being involved, either directly or indirectly. In addition, it also discussed the conditions of campus life in a socio-political situation which was full of tension, as well as the direction of campus policies after the socio-political situation which had begun to stabilize thereafter. This research uses the historical method, which begins by choosing a theme, then continues by looking for contemporaneous sources, especially newspapers such as *Nasional*, *Mertju Suar*, *Suluh Marhaen*, to UGM's internal archives. After verification and interpretation of the sources found, reconstruction and writing were carried out, mainly based on the various research questions above. From the results of the research, it was found that thousands of students, along with several UGM lecturers and staff, were temporarily dismissed from the campus because of their affiliation with various organizations that were considered to be wings of the PKI. Most of them were later declared fired, while a handful of them were reinstated. They were considered part of organizations which the government under Suharto's control were considered banned because they were accused of being involved in the G30S 1965 Incident. Not only were there dismissals and turmoil on campus. Along with the change in political direction at that time, UGM's orientation also changed according to the tendencies of the new government after the dismissal of Sukarno as president.

**Keywords:** Universitas Gadjah Mada, G30S 1965, Political Upheaval, Dismissal of Students

**Abstrak:** Tulisan ini membahas mengenai dampak Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Penelitian ini mengambil batasan temporal dari awal Oktober 1965 hingga tahun 1968 ketika masa transisi politik nasional dapat disebut selesai. Terutama sekali penelitian ini menguraikan respons universitas terhadap adanya peristiwa tersebut serta sebab-sebab yang menjadi alasan bagi diambilnya tindakan kampus terhadap mahasiswa dan dosen yang dituduh terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dibahas pula kondisi kehidupan kampus dalam suasana sosial-politik yang penuh

ketegangan, serta arah kebijakan kampus pasca situasi sosial-politik yang sudah mulai stabil setelahnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang dimulai dengan memilih tema, kemudian dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber sezaman, terutama surat kabar seperti *Nasional*, *Mertju Suar*, *Suluh Marhaen*, hingga arsip-arsip internal UGM. Setelah dilakukan verifikasi serta interpretasi terhadap sumber-sumber yang ditemukan, maka dilakukan rekonstruksi dan penulisan, terutama didasarkan atas berbagai pertanyaan penelitian di atas. Dari hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa ribuan mahasiswa, bersama beberapa dosen serta pegawai UGM diberhentikan sementara dari kampus oleh karena afiliasinya dengan berbagai organisasi yang dianggap sebagai sayap PKI. Sebagian besar dari mereka kemudian dinyatakan dipecat, sedangkan segelintir dari mereka ada yang dipulihkan kembali statusnya. Mereka dianggap sebagai bagian dari organisasi-organisasi, yang oleh pemerintah berwatak militer di bawah kendali Suharto, dianggap terlarang karena dituduh terlibat dalam Peristiwa G30S 1965. Tidak hanya terjadi pemecatan dan gejolak di dalam kampus, seiring dengan berubahnya haluan politik saat itu, orientasi UGM juga ikut berubah menyesuaikan dengan kecenderungan pemerintahan yang baru pasca diberhentikannya Sukarno sebagai presiden.

**Kata Kunci:** Universitas Gadjah Mada, G30S 1965, Gejolak Politik, Pemecatan Mahasiswa

---

## 1. Pendahuluan

Suhu panas persaingan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) antara golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis tidak hanya terjadi di tingkat nasional dan terbatas pada partai-partai politik. Pertarungan ideologi juga terjadi hingga tingkat Perguruan Tinggi yang diejawantahkan melalui berbagai organisasi mahasiswa ekstra kampus yang mewakili ketiga golongan tadi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Periode ini oleh Francois Raillon disebut sebagai masa 'radikalisasi kampus,' suatu masa ketika mahasiswa muncul secara terbuka dan terang-terangan dengan membawa ideologinya masing-masing di arena politik kampus.<sup>1</sup>

Di Universitas Gadjah Mada (UGM), organ-organ ekstra ini mendapatkan arena untuk saling berperang gagasan berupa Dewan Mahasiswa (Dema)<sup>2</sup>, Komisariat

---

1. Francois Raillon, *Politik Dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan Dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (LP3ES, 1989), 9.

2. Dewan Mahasiswa UGM dibentuk pada 11 Januari 1950 dengan ketua Nazir Alwi, wakil ketua Sufaat, dan Koesnadi Hardjasoemantri sebagai Badan Pekerja Dema. Liha Lutfi Hamzah Husin, *Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan: Keluarga Mahasiswa UGM Dari Masa Orde Lama Hingga Pasca-Reformasi* (Yogyakarta: Polgov, 2014), 38.

Dewan Mahasiswa (Kodema) dan Madjelis Mahasiswa. Mereka berlomba-lomba untuk menempatkan kader-kadernya dalam organisasi intra kampus ini, baik sebagai pengurus struktural maupun anggota biasa. Selain itu organ-organ ekstra ini larut dalam kampanye Manipol-USDEK gagasan Presiden Sukarno, saling mengklaim diri sebagai organisasi yang 'progresif-revolusioner' dan setia kepada ajaran sang 'Pemimpin Besar Revolusi,' sambil sesekali saling tuding antar organ siapa yang dituduh kontra-revolusioner, antek asing, maupun plin-plan.

Pada periode 1960an Dema UGM secara umum dikuasai oleh kader-kader GMNI yang duduk dalam kepengurusan, disusul kemudian PMII dan CGMI. Hal ini tergambar dari perolehan suara pemilihan Dewan Mahasiswa UGM 1964. GMNI memperoleh 12.548 suara, disusul kemudian 6.395 dan 2.638 suara untuk PMII dan CGMI. Nama HMI tidak ada dalam daftar karena saat itu dijegal oleh CGMI dengan cara melarang HMI untuk dicalonkan dan mencalonkan diri dalam pemilihan, bahkan untuk sekadar menjadi panitia ataupun dewan pengawas.<sup>3</sup> Merujuk pada sebuah kesaksian, persaingan panas antar organ bahkan terjadi hingga tingkat jurusan. Suasana panas juga terjadi saat pemilihan ketua Senat Mahasiswa 1962 yang dimenangkan oleh tokoh dari GMNI.<sup>4</sup>

Persaingan antar organ yang mewakili gagasan Nasakom ini berakhir pasca meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Dewan Mahasiswa UGM dibekukan oleh pihak kampus. Kegiatan perkuliahan praktis berhenti secara total. Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu dituduh sebagai pihak yang bertanggungjawab oleh Angkatan Darat, yang merasa menjadi korban dan berhak melakukan penumpasan terhadap PKI. Imbasnya semua anggota PKI beserta organisasi yang (dituduh) berafiliasi dengannya ikut dihabisi, tak terkecuali CGMI dan HSI (Himpunan Sardjana Indonesia).

Semua institusi milik Negara, termasuk Perguruan Tinggi mulai 'dibersihkan' dari orang-orang yang dicap sebagai anggota maupun simpatisan PKI dan organisasi *onderbouw* partai.<sup>5</sup> Mahasiswa, dosen, dan pegawai yang tergabung dalam CGMI, HSI, dan serikat pekerja (ketiganya selalu dilekatkan sebagai ormas PKI) mulai diberhentikan statusnya sebagai warga kampus hingga berakhir pada penangkapan dan pemenjaraan yang dilakukan oleh tim pembersihan yang disponsori oleh RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat).<sup>6</sup>

---

3. Julianto Ibrahim, "Goncangan Pada Keselarasan Hidup Di Kesultanan," in *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 111.

4. Kesaksian Dr. Sofyan Djaenuri (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Jurusan Sejarah UGM 1958 dalam F. X. Baskara Tulus Wardaya, *Suara Di Balik Prahara: Berbagi Narasi Tentang Tragedi '65*, Cet. 1. (Yogyakarta: Galangpress ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2011), 67.

5. Abdul Wahid, "Campus on Fire: Indonesian Universities During the Political Turmoil of 1950s-1960s," *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, no. 95 (June 29, 2018): 39–41.

6. Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2008), 585.

Peristiwa G30S yang sebelumnya dibumbui persaingan politik kampus antar organisasi mahasiswa membawa dampak yang cukup pelik di UGM. Dari pemaparan latar belakang penelitian ini maka dapat dirumuskan setidaknya tiga pertanyaan penelitian: Apa saja yang terjadi di Universitas Gadjah Mada pasca huru-hara peristiwa G30S? Bagaimana reaksi pihak kampus terhadap mahasiswa dan civitas akademika lainnya yang dicap sebagai 'kiri'? Seperti apakah kondisi sosial dan politik kehidupan kampus pasca pembersihan dan sterilisasi kampus dari unsur-unsur 'kiri'? Penelitian ini membatasi lingkup spasial kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, namun ada sedikit tambahan untuk melihat kampus 'plat merah' (kampus milik pemerintah) lainnya yang ada di Indonesia sebagai perbandingan. Sedangkan batas temporal penelitian adalah 1965-1968, pasca terjadinya Gerakan 30 September (G30S) 1965 hingga masa-masa kehidupan kampus dan perkuliahan serta kegiatan akademis lainnya dapat disebut kembali normal sekitar 1968, selain pula karena Soeharto akhirnya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang berarti kekuasaan Negara sudah benar-benar berada di bawah kendali Angkatan Darat, yang notabene kebijakannya juga dijalankan oleh institusi-institusi Negara di bawahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang terjadi di UGM yang notebene sebagai kampus ber'plat merah' (milik pemerintah) yang ada di Yogyakarta pasca peristiwa G30S. Selain itu tulisan ini berusaha menghadirkan narasi baru mengenai keadaan kampus dan civitas akademika pasca 1965 karena selama ini belum pernah ataupun masih sedikit sekali ditulis secara khusus sebagai sebuah tulisan sejarah. Hal ini karena narasi-narasi yang ada seputar Peristiwa 1965 masih berfokus pada penangkapan, pemenjaraan, maupun penyiksaan yang menimpa anggota-anggota PKI, Lekra, BTI, dan orams-ormas kiri lainnya serta orang-orang yang ikut tertuduh, tetapi belum menyentuh pada tingkat perguruan tinggi yang notabene merupakan tempat para akademisi bernaung.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Setelah menentukan tema, kemudian dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber sezaman yang dapat menjadi basis data utama untuk merekonstruksi peristiwa tersebut. Salah satunya adalah dengan mengakses arsip yang tersimpan di Arsip Universitas Gadjah Mada, Kompleks Perpustakaan Pusat UGM yaitu arsip berupa Surat Keputusan (SK) Rektor UGM, yang antara lain berisi tentang penonaktifan maupun skorsing terhadap mahasiswa yang tergabung dalam CGMI dan Perhimi. Selain itu ada pula SK mengenai pembentukan tim *screening* dan formulir pemecatan mahasiswa. Walaupun secara keseluruhan kurang lengkap, namun arsip yang tersisa setidaknya masih bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di UGM.

Sumber lainnya berupa surat kabar dan majalah sezaman, antara lain surat kabar *Kompas*, *Nasional*, *Mertju Suar*, *Suluh Indonesia*, dan *Suluh Marhaen* antara 1965-1967

yang banyak memberitakan mengenai kondisi kampus UGM dan suasana perpolitikan Yogyakarta secara umum selama dan pasca ‘pembersihan’ oleh militer dan organisasi massa yang tentunya disponsori oleh pemerintah militer. Kecuali *Kompas*, surat kabar yang disebutkan di atas merupakan surat kabar lokal dengan kecenderungan penulisan yang memihak pada PNI dan Sukarno (*Nasional, Suluh Indonesia, dan Suluh Marhaen*), maupun surat kabar dengan latar belakang Muhammadiyah (*Mertju Suar*). Untuk memenuhi sumber ini telah dilakukan pengaksesan di Jogja Library Center Malioboro dan Pusat Informasi Kompas (PIK) Kotabaru, Yogyakarta. Kendala dalam pengaksesan sumber surat kabar adalah minimnya surat kabar yang tersedia untuk periode 1965-1966. Ada kesan bahwa telah terjadi pemusnahan terhadap surat kabar untuk periode ini, selain fakta bahwa Angkatan Darat membredel hampir semua surat kabar tepat pada awal Oktober 1965 sebelum akhirnya mengizinkan untuk kembali terbit mulai akhir Oktober 1965.

Metode wawancara juga dilakukan guna mendukung sumber-sumber tertulis. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terbagi dari: *Pertama*, eks mahasiswa yang dulunya tergabung dalam CGMI yang pada 1965 diberhentikan status mahasiswanya dari UGM. *Kedua*, eks mahasiswa angkatan 1960an yang tergabung dalam IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) dan saat itu berkuliah di IKIP Yogyakarta. Pertimbangannya adalah karena rata-rata suasana kampus yang nyaris sama menjadikan narasumber di luar UGM masih dapat dikatakan relevan dan pada akhirnya saat terjadi proses penangkapan maupun interogasi mereka dikumpulkan jadi satu dari semua kampus.

Tulisan ini terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama memberikan gambaran latar belakang keadaan politik kampus pada era Demokrasi Terpimpin yang dinilai cukup panas, yang dapat disebut sebagai representasi atau miniatur dari situasi politik di tingkat nasional. Bagian kedua menjelaskan mengenai situasi yang terjadi di dalam internal kampus UGM, terutama menyoroti sikap UGM dalam mengambil sikap merespons situasi yang terjadi saat itu. Sedangkan bagian terakhir berupa kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian di atas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Menggusur Unsur “Kiri” di Kampus

“Kalau CGMI tidak mampu menyingkirkan HMI dari kampus, sebaiknya kalian sarungan saja.”<sup>7</sup> Kira-kira begitulah ucapan Dipa Nusantara Aidit, ketua umum Central Komite Partai Komunis Indonesia dalam pidatonya di depan Kongres III CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) pada 29 September 1965 yang didengar oleh Burhan Zainuddin Rusjiman, seorang mahasiswa tahun ketiga Fakultas Hukum

---

7. Burhan Zainudin, “Saya punya license to kill,” in *Pengakuan algojo 1965*, Cetakan pertama. (Jakarta: Tempo Publishing, 2013), 53.

UGM sekaligus anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang semakin membakar amarahnya. Ia menuturkan bahwa sebelumnya ia dan kelompok-kelompok mahasiswa Islam lain sering mendapat teror dari CGMI. Dalam penuturannya, hampir setiap hari CGMI menggelar demo dan orasi di Malioboro pada kurun 1963-1964. Selain itu ia sempat dikeluarkan dari kampus dan dicap kontrarevolusioner karena memasang spanduk menuntut pembubaran CGMI.

Cerita di atas hanyalah segelintir dari sekian banyak persaingan panas antar organisasi mahasiswa ekstra kampus di UGM menjelang tahun 1965. Kampus dipenuhi dengan berbagai persaingan antar aliran politik yang dianut oleh mahasiswa, baik secara terbuka maupun diam-diam dan saling serang di belakang. Perseteruan-perseteruan seperti ini yang kemudian menyulut dendam yang akhirnya terlampiaskan saat perburuan orang-orang komunis dan yang dituduh sehaluan maupun simpatisannya pasca pecahnya peristiwa G30S.

Tidak lama berselang pasca kegagalan Gerakan 30 September (G30S) 1965 dan propaganda anti-PKI mulai kencang karena mereka dituduh sebagai dalang di baliknya, Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) Brigjend Dr. Sjarif Thajeb mengeluarkan instruksi no. 02/Dar/1965 tentang pembekuan untuk sementara waktu organisasi-organisasi mahasiswa CGMI dan PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia). Seperti yang diwartakan surat kabar *Nasional* terbitan Yogyakarta, melaporkan bahwa: "*Semua anggota CGMI dan Perhimi supaya dipetjaj sementara dari lingkungan Perguruan Tinggi, sambil menunggu keputusan lebih lanjut serta diwadajibkan lapor setiap hari kerdja kepada pimpinan perguruan tinggi masing2.*"<sup>8</sup> Juga beasiswa ikatan dinas dari pemerintah bagi mahasiswa-mahasiswa yang dituduh terlibat G30S maupun sebagai anggota CGMI ikutan dibekukan tunjangan bulanannya. Melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UGM no. 13, 14, dan 15 th. 1965 tertanggal 15 Oktober 1965 diputuskan bahwa anggota Majelis Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan Komisariat Dewan Mahasiswa dinonaktifkan untuk sementara waktu dari keanggotaannya dan juga statusnya sebagai mahasiswa UGM.

Dua minggu berselang, pada 1 November 1965 sudah terbit SK Rektor UGM dalam bentuk formulir pemberhentian atau dikeluarkan sementara, surat pemecatan sementara maupun permanen dan pencabutan Tunjangan Belajar dan Ikatan Dinas dari UGM bagi mahasiswa yang dituduh tersangkut G30S ataupun menjadi pengurus/aktivis/anggota CGMI dan Perhimi.<sup>9</sup> Mereka dilarang mengikuti perkuliahan, praktikum, tentamen, ujian, dan segala kegiatan akademis kampus.

---

8. "Nasional 28 Oktober 1965," *Koran Nasional*, n.d.

9. Lihat Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.19" (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965); Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.20" (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965); Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.21" (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965).

Dalam sebuah tulisan hasil wawancara dengan Inajati Adrisianti, mahasiswa Arkeologi UGM yang berkuliah di dekade 1960an tersebut (belakangan menjadi dosen di jurusan yang sama) menyebutkan bahwa ada 2.968 mahasiswa UGM yang dipecat mulai 1 November 1965. Kebanyakan dari mereka yang dipecat adalah mahasiswa Fakultas Sastra dan Fakultas Sospol.<sup>10</sup> Disebutkan pula dalam wawancara dengan Djoko Suryo di tulisan yang sama bahwa pemeriksaan (*screening*) dilakukan oleh Lukman Sutrisno (belakangan menjadi profesor di UGM).<sup>11</sup> Pertama-tama diteliti terlebih dahulu mahasiswa-mahasiswa yang menjadi anggota CGMI atau organisasi komunis lainnya. Apabila bisa menunjukkan kartu anggota organisasi lain, maka masih diperbolehkan kuliah. Tetapi jika tidak bisa menunjukkan maka akan diskors bahkan dikeluarkan dari UGM.<sup>12</sup>

Mengenai angka mahasiswa yang dikeluarkan dari UGM belum ada dokumen yang secara pasti menyajikan data total dan nama-nama mahasiswa yang diberhentikan. Hanya ada sebuah kutipan berita singkat di surat kabar *Kompas* dalam rubrik Warta Daerah yang menyebutkan bahwa 3.006 mahasiswa beserta 115 pegawai/dosen UGM yang dipecat karena terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G30S.<sup>13</sup>

Pemecatan ini mendapat pembelaan dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam PPMI (Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) Konsulat Yogyakarta yang terdiri dari: GMNI, GMKI, PMII, PMKRI yang dikatakan bahwa akan membulatkan tekad membela mahasiswa-mahasiswa yang dipecat akibat kekeliruan ataupun fitnah.<sup>14</sup> Juga Dewan Mahasiswa UGM yang mengatasnamakan 20.600 anggotanya menyatakan setia kepada fungsinya sebagai alat revolusi, pengawal ajaran dan garis kepemimpinan Bung Karno.<sup>15</sup>

Kemudian Pelaksana Kuasa Perang (Pekuper) DIY/Kedu mengadakan pertemuan pada 11 Januari 1966 di Balai Senat UGM Bulaksumur bersama Dewan Mahasiswa se-Yogyakarta dan berencana membentuk tim *task force*. Hadir pula Rektor UGM Prof. Ir. H. Johannes dan memberi pernyataan bahwa sangat penting dilakukakan reorganisasi Men Mahakarta (kini dikenal sebagai Resimen Mahasiswa) guna disesuaikan dengan komposisi Garuda Pancasila dan tugas-tugas mengikis ideologi G30S.<sup>16</sup>

---

10. Ibrahim, "Goncangan Pada Keselarasan Hidup Di Kesultanan," 128–129.

11. Nama Lukman Sutrisno juga dibenarkan oleh salah satu korban penangkapan bernama Christina Sumarmiyati, mantan aktivis IPPI saat berkuliah di IKIP Yogyakarta. Sumarmiyati mengalami langsung interogasi dan penyiksaan yang dilakukan oleh Lukman beberapa saat setelah ia ditangkap sekitar Oktober 1965 di Yogyakarta. Christina Sumarmiyati, "Wawancara Eks Mahasiswa IKIP Yogyakarta Dan Aktivis IPPI Di Jl. Veteran, Yogyakarta," October 1, 2015.

12. Sumarmiyati, "Wawancara Eks Mahasiswa IKIP Yogyakarta Dan Aktivis IPPI Di Jl. Veteran, Yogyakarta."

13. "Kompas 10 Januari 1966," *Koran Kompas* (Jakarta, January 10, 1966).

14. "Suluh Indonesia 12 Januari 1966," *Koran Suluh Indonesia*, January 12, 1966.

15. "Suluh Indonesia 20 Januari 1966," *Koran Suluh Indonesia*, January 20, 1966.

16. "Suluh Indonesia 15 Januari 1966," *Koran Suluh Indonesia*, January 15, 1966.

Surat kabar *Nasional* memberitakan bahwa bagian Biro Rektor UGM, sesuai dengan instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Dr. Sjarif Thajeb sampai dengan 2 November 1965 telah memberhentikan sementara 14 orang tenaga edukatif dan 38 orang tenaga administrasi.<sup>17</sup> Tetapi tidak disebutkan siapa saja nama-nama tenaga akademis maupun pegawai yang diberhentikan. Yang jelas adalah setiap anggota HSI (Himpunan Sardjana Indonesia) secara otomatis akan diberhentikan, selain karena diburu oleh pihak militer karena afiliasi HSI dengan PKI. Dekan Fakultas Psikologi sekaligus anggota HSI, Dr. Busono Wiwoho ditangkap oleh Corps Kehakiman dan tim dari Pengadilan Negeri Blora di sebuah rumah persembunyian di Blora pada 22 November 1965. Ia ditangkap bersama Heryani, istrinya.<sup>18</sup> Ada pula dosen-dosen Fakultas Sospol yang mengalami pemecatan seperti Burhan Respati, Imam Sutrisno, Sudiono Wakhid, Warsito, dan Joyo Wiguno.<sup>19</sup> Tokoh-tokoh HSI Yogyakarta yang sebagian besar merupakan profesor dan doktor sudah banyak yang ditangkap pada pertengahan Desember 1965.<sup>20</sup>

Menurut kesaksian Ninik Rahayu (nama samaran), mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM angkatan 1962, keadaan UGM pasca-G30S sangat kacau. Kegiatan belajar-mengajar berhenti sekitar setahun sembari mahasiswa yang menjadi anggota CGMI dan dosen yang tergabung dalam HSI ditangkapi.<sup>21</sup> Kekacauan dan kuliah yang berhenti selama satu tahun ini juga dibenarkan oleh Asnawi (nama samaran), mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM angkatan 1965 yang baru saja masuk kuliah namun terhenti dan baru bisa kembali aktif belajar pada 1967.<sup>22</sup>

Secara umum, tokoh-tokoh maupun anggota HSI yang menjadi sasaran adalah dari pengurus HSI Cabang Yogyakarta yang dalam susunan terakhir terdiri dari Ketua: Prof. Drs. L. GJ Samallo (Jl. Djendral Sudirman 55), Dr. Ir Munadji, Drs. Sukarsono (Sekip Flat C/9), sekretaris: Drs. Sumarto (Bulaksumur C/14), Drs. Harsono dan bendahara: Drs. Suwarno Marcus (Djojonegaran Mg II/115). Sedangkan nama-nama anggotanya antara lain Drs. Sofjan Walujo, Prof. Djojodiguno SH, Prof. Sudijono Wachid, Masrun SH., Prof. Ir. Purbodiningrat, Ir. Hartono, Ir. Isbandi, Dr. Busono Wiwoho, Drs. Lei Pik Tjay, Drs. Sunardi, Drs. Hapsoro, Drs. Marjadi, Wasis SH, Drs. Muljadi, Ir Pratojo, Drs. Sujono, Drs. Bismowalgito, Dr. Yap Kie Tong, Dr. Mardjaban dan Drs. Martono.

Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) Kolonel Sarwo Edhie Wibowo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UGM di Stihinggil Keraton,

17. "Nasional 2 November 1965," koran Kompas juga memberitakan hal yang serupa karena sumber berita ini dikutip dari LKBN Antara, lihat *Koran Nasional*, November 2, 1965; "Kompas 5 November 1965," *Koran Kompas* (Jakarta, November 5, 1965).

18. "Nasional 23 November 1965," *Koran Nasional*, November 23, 1965.

19. Ibrahim, "Goncangan Pada Keselarasan Hidup Di Kesultanan," 128–129.

20. "Nasional 18 Desember 1965," *Koran Nasional*, December 18, 1965.

21. Wardaya, *Suara Di Balik Prahara*, 159.

22. Wardaya, *Suara Di Balik Prahara*, 113.



22 November 1965. Prof. H. Johannes dalam sambutannya mengatakan perlu berterimakasih kepada RPKAD karena telah menyelamatkan Revolusi Indonesia dari penyelewengan kaum kontra revolusi. Ia juga mengatakan bahwa Revolusi Pancasila adalah kiri.<sup>23</sup> Pada intinya Sarwo Edhie sebagai pengisi kuliah umum ingin memprogandakan bahwa RPKAD berjuang untuk menjaga dan menyelamatkan Pancasila dan Revolusi Indonesia. Selain itu ia juga menjelaskan praktik anggota-anggota PKI dalam mengadakan infiltrasi ke dalam tubuh Angkatan Darat.

Penegasan untuk melakukan screening terhadap mahasiswa UGM dilaksanakan dengan membentuk Team Peneliti Khusus Mahasiswa (TPCM) pada 4 Agustus 1966 yang langsung diketuai oleh Rektor UGM saat itu, drg. Nazir Alwi. Tim ini tidak hanya beranggotakan internal UGM saja, namun ada nama-nama seperti Soetiknjo S.H. (Wakil Pokuper DIJ/Kedu), IP II Gandhi (Wakil Kepolisian), dan L.U. I B.Widjonarko (Wakil AURI) sebagai anggota tim. Pernyataan yang cukup provokatif diberikan oleh Deputy Menteri PTIP Masjhuri S.H. dihadapan mahasiswa UII yang mengadakan syukuran kampus. Ia mengatakan bahwa beberapa anggota Dewan Penyantun UGM, tanpa menyebutkan lebih lanjut nama spesifiknya, telah ia sikat karena ia tahu siapa saja yang duduk di sana. Selanjutnya ia akan menindak tegas dosen-dosen khususnya di UGM yang diharapkan tidak mengeruhkan suasana. Dalam kuliah umum itu juga dilakukan pelantikan pengurus caretaker Kodema Fak. Sospol UGM yang diketuai oleh Fachruddin Thani.

Dalam pidatonya setelah pelantikan, Fachruddin Tani menyatakan antara lain *"bahwa dengan adanya dominasi golongan dan mismanagement difakultas Sospol pada masa2 jl, maka djatuhlah nilai2 keagungan jg dikandung oleh lembaga pendidikan tinggi kita. (...) Untuk ini ia mengadjak ormas2 lainnja jaitu GMNI dan GMKI jg disebutnja sebagai „teman2 kami“, untuk ikut serta membangun fakultas Sospol."*<sup>24</sup>

Tidak disebutkan nama-nama pegawai yang dipecat dari angka-angka yang disebutkan dalam *Kompas* edisi 10 Januari 1966, yang menyebutkan ada sekira 115 dosen/pegawai UGM yang diberhentikan. Namun jika melompat agak jauh pada 1968, dengan arsip yang masih tersedia didapati nama Mudjimin, Dono, Tukimin, dan Wirjogunarto yang dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai UGM.<sup>25</sup>

Sejauh ini, yang tersisa dalam sumber surat kabar sezaman adalah berita mengenai separuh pegawai Perpustakaan Pusat UGM yang diskors dari pekerjaannya karena mereka menjadi anggota serikat pekerja yang berafiliasi dengan PKI. Para pegawai yang diskors ini mendapat tuduhan bahwa sebelumnya mereka melakukan tindakan

23. "Nasional 23 November 1965."

24. "Merju Suar 2 Juni 1966," *Koran Mertju Suar*, June 2, 1966.

25. Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No.68.14." (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1968); Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No.68.31." (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1968).

sabotase terhadap kelancaran kerja di perpustakaan, yaitu dengan memindahkan buku-buku yang telah disusun rapi, memberi nomor buku yang meloncat-loncat, dsb. Kepala Perpustakaan Pusat UGM Murjopranoto mengatakan bahwa masih akan ada seleksi yaitu memisahkan antara orang yang hanya ikutan dan yang benar-benar merupakan kader PKI. Orang yang hanya ikut-ikutan masih bisa diterima bekerja kembali dengan beberapa syarat. Namun untuk kategori yang terakhir sama sekali tidak bisa diterima bekerja kembali.<sup>26</sup> Pembersihan tenaga pengajar kemudian dilakukan pihak rektorat dengan membentuk Tim Peneliti Khusus Tenaga Pengajar pada 19 Mei 1967 yang diketuai langsung oleh Rektor UGM saat itu, drg. Nazir Alwi.<sup>27</sup>

Tidak banyak jejak siapa saja nama-nama civitas akademika UGM, khususnya mahasiswa maupun dosen yang dipecat bahkan sampai dibuang ke pulau Buru. Serpihan daftar nama-nama ini beberapa masih bisa ditemukan antara lain Ibnu Ruslan (Sastra Indonesia) anggota CGMI Yogyakarta yang dikenal vokal terhadap Manifesto Kebudayaan. Ada pula disebutkan nama Sujono dan Tedjo Bayu yang keduanya merupakan anggota CGMI dari Fakultas Geografi UGM dan akhirnya dibuang ke Buru.<sup>28</sup> Sedangkan dalam catatan Pramoedya Ananta Toer ada nama Antenius Mardiman (Fakultas Pertanian) dan Mustaji (Fakultas Kedokteran Hewan).<sup>29</sup>

Akhirnya pada tanggal 20 Januari 1966 diadakan upacara penutupan indoktrinasi di halaman Gedung Pusat UGM di Bulaksumur bagi para dosen, asisten, pegawai, dan mahasiswa yang dituduh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G30S. Disebutkan bahwa upacara yang dinilai berjalan agak seret tersebut diikuti oleh kurang lebih 1500 peserta. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan pengutukan terhadap peristiwa G30S, insyaf diri tentang dasar negara Pancasila – Manipol Usdek, dan setia kepada Pemimpin Besar Revolusi. Uniknya, dalam sebuah pemberitaan di *Kompas* disebutkan bahwa masih saja ada tuduhan bahwa ketika para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka dianggap tidak serius menyanyi layaknya mereka menyanyi lagu 'Gendjer-gendjer.'<sup>30</sup>

Setelah suasana kampus menjadi kacau dan perkuliahan terhenti, Dewan Mahasiswa (Dema) UGM ikut terganggu pula dengan komposisi anggotanya yang berantakan pasca ditangkapinya mahasiswa kader CGMI dan Perhimi.<sup>31</sup> Kemudian sejumlah

26. "Mertju Suar 10 Juni 1966," *Koran Mertju Suar*, June 10, 1966.

27. Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 67.7" (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1967).

28. I. G. Krisnadi, *Tahanan politik Pulau Buru, 1969-1979*, Cet. 1. (Jakarta: LP3ES, 2001), 89; Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru*, Cet. 1. (Magelang: IndonesiaTera, 2004), 452.

29. Pramoedya Ananta Toer, *Nyayi Sunyi Seorang Bisu* (Jakarta: Lentera, 1995), 299.

30. "Kompas 3 Februari 1966," *Koran Kompas* (Jakarta, February 3, 1966).

31. Banyak anggota CGMI yang menempati jabatan struktural di kepengurusan Dewan Mahasiswa maupun Komisariat Dewan Mahasiswa. Lihat SK Rektor UGM no. 13, 14, dan 15 tahun 1965 mengenai nama-nama pengurus Dema dan Kodema yang dinonaktifkan. Lebih lanjut dalam Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.13" (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965); Rektor UGM, "Surat

mahasiswa UGM melakukan demonstrasi melampiaskan ketidakpuasannya terhadap Dema UGM dengan mencorat-coret sekretariat Dema UGM yang terletak di Kampus Pagelaran, Kompleks Keraton. Mereka menuliskan antara lain “BUBARKAN DEMA PLIN PLAN,” “BUBARKAN PEWARIS GESTAPU,” “DEMA GAMA BUBAR.”.<sup>32</sup> Tidak disebutkan dari kalangan mahasiswa mana yang melakukan aksi ini, namun menurut laporan surat kabar *Mertju Suar* mereka para mahasiswa progresif-revolusioner melakukan aksi karena tidak puas dengan beberapa anggota Dema yang berasal dari CGMI yang dulu dituding melakukan fitnah saat terjadi G30S. Selain itu ada tudingan bahwa sejak lama Dema dikuasai oleh kader-kader CGMI dan ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan majalah GAMA.

Akhirnya, Dema UGM secara resmi dibekukan melalui surat keputusan Rektor UGM dan diumumkan kepada KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia)<sup>33</sup> yang melakukan apel di lapangan olahraga Bulaksumur pada Jumat, 15 April 1966. Dalam keputusan rektor disebutkan antara lain: pembekuan Dewan Mahasiswa UGM, pembersihan UGM dari unsur Gestapu/PKI/dan aspirasi-aspirasinya (dalam hal ini rektor memerlukan bukti-bukti yang lengkap), dan mengenai Men Mahakarta diserahkan kepada team dari Pelaksana Kuasa Perang (Pekuper) dan wewenang untuk membekukan Men Mahakarta tersebut adalah wewenang Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jateng Brigjen Surjosumpeno.<sup>34</sup> Masa jabatan yang sudah berakhir dan karena komposisi strukturalnya sudah berubah pasca pemecatan anggota-anggota CGMI dan Perhimi maka Dema dan Kodema UGM dibekukan oleh Rektor mulai 13 April 1966.<sup>35</sup>

Namun disebutkan bahwa massa KAMI tetap belum puas atas jawaban rektor tersebut. KAMI menyatakan bahwa mereka akan terus bertindak terhadap oknum-oknum yang dituding sebagai pendukung “Gestapu” dan kaum plin-plan. Dandim (Komandan Distrik Militer) 0734 Letkol Djimin dalam sambutannya mengatakan bahwa: *“tuntutan sutji mahasiswa tsb, pasti akan mendapatkan dukungan dari golongan progressif revolusioner. Ditegaskan, walaupun djawaban rektor itu belum memuaskan, maka hendaknja para mahasiswa tetap melandjutkan perdjjuangan bahu membahu bersama ABRI. ABRI akan selalu melindungi aksi2 mahasiswa, hal ini dibuktikan dengan adanja pendjagaan jg kuat dari ABRI.”*

---

Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.14” (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965); Rektor UGM, “Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.15” (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965).

32. “Mertju Suar 13 April 1966,” *Koran Mertju Suar*, April 13, 1966.

33. KAMI merupakan organisasi gabungan dari beberapa organ mahasiswa yang sebelumnya menjadi seteru CGMI maupun GMNI seperti HMI, PMKRI, GMKI, dll.

34. “Mertju Suar 16 April 1966,” *Koran Mertju Suar*, April 16, 1966.

35. Rektor UGM, “Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 66.3” (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1966).

Tidak lama kemudian Rektor UGM juga melarang Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo) melakukan kegiatan-kegiatannya di lingkungan UGM melalui SK Rektor UGM no. 5 tahun 1966 tanggal 23 Mei 1966 dengan alasan bahwa Germindo tidak ikut dalam Ikrar Bersama Ormas-ormas Mahasiswa se-DIY dalam rapat Dewan Penyantun UGM pada 4 Maret 1966 dan diragukan kesetiiaannya kepada Revolusi Pancasila. Setelah organ-organ politik mahasiswa di UGM menjadi beku, didukung pula oleh kondisi di tingkat nasional, maka KAMI menjadi aktor penting pasca-G30S (kelompok yang kemudian populer disebut sebagai Angkatan '66), organ antikomunis yang dibentuk di Jakarta pada 8 Oktober 1965.<sup>36</sup>

Di Yogyakarta hal ini dapat dilihat saat sekitar 3000 mahasiswa yang tergabung dalam KAMI Yogyakarta pada 12 April 1965 melakukan aksi di halaman Gedung Induk UGM Bulaksumur menuntut penghentian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dema, Kodema, dan Men Mahakarta. Kelompok ini juga menuntut pembersihan kedudukan dekan, dosen, pegawai di lingkungan UGM yang dianggap mewarisi "aspirasi mental" PKI agar ditinjau kembali. KAMI yang diwakili oleh Sjaiful Mudjab berhasil menemui Pembantu Raktor UGM Soepojo M.Sc. untuk menyampaikan pernyataannya.<sup>37</sup>

KAMI Yogyakarta kembali membuat pernyataan menuntut beberapa dosen UGM dipecat. Nama-nama yang dituding oleh KAMI antara lain Drs. Sukarno (Dekan II Fak. Sospol), Drs. Hengky Sumarso (Pembantu Dekan III Fak. Sospol), Purbadi S.H. (Pembantu Dekan III Fak. Hukum), Drs. Suhardi Sigit (Dekan Fakultas Ekonomi UGM Cabang Magelang), Drs. Kaswardjono (Pembantu Dekan I Fak. Ekonomi), Drs. Warsito dan Drs. Abdurrahman (Fak. Sospol). KAMI juga meminta kepada Rektor UGM agar menunjuk mereka untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang Dewan Mahasiswa UGM yang sebelumnya telah dibekukan sampai terbentuknya Dewan Mahasiswa yang baru. Mereka juga mendesak kepada Rektor UGM agar segera membekukan kegiatan GMNI Ali-Surachman di lingkungan UGM.<sup>38</sup> Akhirnya nama-nama dosen ini secara resmi dipecat dan dicutikan pada 24 Mei 1966.<sup>39</sup>

Pada 28 April 1966, Pembantu Deputy Menteri PTIP Brigjen Prof. Dr. Sumantri Hardjoprakoso memberikan *briefing* alias pengarahan kepada para dosen, asisten dosen, dan warga UGM di kampus Bulaksumur. Isi pengarahan tersebut antara lain mengatakan bahwa dengan Panca Azimat Revolusi janganlah mengaburkan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Ia juga meminta kepada para dosen/asisten untuk bisa menanggapi tuntutan KAMI dan KAPPI, yang ia sebut

---

36. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, 594.

37. "Mertju Suar 13 April 1966."

38. "Mertju Suar 25 April 1966," *Koran Mertju Suar*, April 25, 1966.

39. "Kompas 9 Juni 1966," *Koran Kompas* (Jakarta, June 9, 1966).

mewakili suara rakyat untuk menegakkan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).<sup>40</sup> Lagi-lagi KAMI mendapat semacam legitimasi dan perlindungan dari pihak penguasa saat itu.

KAMI di lingkungan UGM semakin vokal. Ini ditandai salah satunya saat KAMI Fakultas Hukum UGM mendesak Rektor UGM untuk menurunkan Purbadi Hardjoprajitno S.H. dari jabatannya sebagai Pembantu Dekan III dan dosen Fakultas Hukum UGM. Kesalahan yang dituduhkan padanya antara lain ia datang dan memberikan sambutan pada acara yang disebut "latihan testing" yang diselenggarakan oleh GMNI pada 5 dan 8 Agustus 1965. Acara ini dituduh sebagai pembocoran soal-soal ujian masuk bagi mahasiswa baru Fakultas Hukum. Ia juga disebut memberikan izin penggunaan Ruang VII Pagelaran untuk rapat GMNI (Ali-Surachman) pada 12 Desember 1965. Selain itu ia ikut serta dalam pawai bersama peleton GMNI pada pawai 15 Maret 1966 dan ia dituduh ikut meneriakkan yel-yel "Hidup Soebandrio, Ganyang Osa-Usep".<sup>41</sup>

KAMI Fakultas Sospol juga melakukan apel di kampus Pagelaran dan memberikan pernyataan bahwa telah lama terjadi kecurangan di Fakultas Sospol. Apel ini sebagai respon atas keputusan Dewan Penyantun UGM yang telah membebas tugaskan untuk sementara waktu pimpinan dan dosen Sospol yang dituduh "*Jang mau mampartaikan lembaga2 pendidikan tinggi dan oknum2 jang rendah moralnja sehingga berani minta uang sogok untuk memasukkan mahasiswa.*" Akhirnya pada 29 Mei 1965 kunci-kunci dari seluruh kompleks Pagelaran (Fakultas Sospol dan Hukum) diserahkan kepada Rektor UGM.<sup>42</sup>

*"Saja sebagai penegak hukum, penegak revolusi dan sebagai anggauta Dewan Penjantun UGM harus bertindak objektif, berdiri diatas semua golongan jang ada. Dalam fungsi saja demikian itu saja katakan disini, bahwa 5 orang pimpinan/dosen Fak. Sospol jang baru2 ini dibebastugaskan untuk sementara itu, benar2 memang telah bersalah. Djadi pembebasan tugas itu tidak didasarkan karena mereka adalah anggauta partai tertentu,"* demikian ucapan AKBP Drs. Soetarjo caretaker Dekan Fak. Sospol UGM, Dan Dik 096 dalam kuliah umumnya di hadapan mahasiswa, dosen, asisten dan pegawai Fakultas Sospol UGM di Sitinggil Jogjakarta. Ia juga mengatakan telah mempercayakan KAMI untuk membentuk kembali Kodema, yang ia sebut sebagai "*student body*" di setiap fakultas.<sup>43</sup>

KAMI UGM akhirnya disertai tugas untuk menjabat sebagai *caretaker* Dewan Mahasiswa UGM dan mengadakan sidangnya yang pertama pada 13 Juni 1965 di

40. "Mertju Suar 29 April 1966," *Koran Mertju Suar*, April 29, 1966.

41. "Mertju Suar 9 Mei 1966," *Koran Mertju Suar*, May 9, 1966.

42. "Mertju Suar 26 Mei 1966," *Koran Mertju Suar*, Mei 1966.

43. "Merju Suar 22 Juni 1966," *Koran Mertju Suar*, June 22, 1966.

asrama Margasiswa Jalan Dr. Wahidin 48. Sidang itu antara lain membentuk susunan personalia *caretaker* Dewan Mahasiswa UGM sebagai berikut: Presidium – M. Marsjoem (PMII), Rudolf Pamor (PMKRI), Ramlie (MAPANTJAS), Kastolani (IMM), Idris Idham (SEMM). Sekretaris: A. Madjid Buchori (HMI), Buchori Hasan (GERMAHI), A. Muluk (GEMPAR), Robert Hasibuan (GMKI), Bendahara: Asaat Esjam (IMM), Abdul Munim (PMII), Idris Djafar (PELMASI).<sup>44</sup>

*Caretaker* Kodema Fakultas Psikologi UGM juga dibentuk pada 4 Juli 1966 dengan unsur-unsur KAMI yang sangat kuat. Upacara serah terima dilakukan di Ruang I Bulaksumur dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Psikologi. Adapun struktur & personalia pengurus tersebut adalah: Ketua I: Surjanto Sukadji B.Sc. (HMI), Buntarsih (PMKRI). Ketua II: Wazir Nuri (GERMAHI). Sekretaris: Ridwan Djuned (PMII) Sekretaris I: Supordjo B.Sc. (SEMMI) Sekretaris II: Moh. Sukarhari B.Sc. (PELMASI). Bendahara: Moh. Sjakba (IMM) Bendahara I: Muhari S.Sc. (PELMASI).<sup>45</sup>

Perseteraan yang melibatkan KAMI vs GMNI terjadi di 'Kampus Sastra.' KAMI Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) UGM menuntut GMNI Yogyakarta dibubarkan. Tuntutan ini dilakukan karena GMNI Yogyakarta dinilai menolak KAMI sebagai wadah bagi organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus. Padahal organ-organ lain seperti HMI, PMKRI, IMM, PMII, MAPANTJAS semua bergabung dalam KAMI. Selain itu Komisariat GMNI Sasdaya juga dituduh menyebarkan pamflet gelap dan melakukan gangguan keamanan di lingkungan fakultas pada 21 Juli 1966. Tuduhan lainnya adalah GMNI Sasdaya telah menjerumuskan Fakultas Sastra dan Kebudayaan untuk memantapkan Gestapu-PKI dengan menolak Chairil Anwar dan Hari Sastra 28 April, hingga menyebabkan Fakultas Sasdaya sebagai lembaga ilmiah telah kehilangan kewibawaannya.<sup>46</sup>

Tuntutan KAMI Sasdaya seminggu kemudian mendapat sambutan dari Rektor UGM. Rektor menjelaskan melalui surat yang dikirimkan kepada dekan-dekan fakultas yang ada di UGM bahwa segala kegiatan GMNI pada tiap-tiap fakultas tidak akan dihalang-halangi dengan jaminan bahwa tiap kegiatannya diarahkan kepada suasana persatuan dan kesatuan. Rektor mengharapkan agar semua pihak tidak saling menghalangi dan mengganggu dan pimpinan fakultas supaya menjalankan tugas dengan baik.<sup>47</sup>

Tidak mau kalah dengan KAMI, pada awal September 1966 GMNI yang notabene tidak (mau) tergabung dalam KAMI mencoba kembali menghidupkan organisasi intra kampus yang kemudian diberi nama Kema (Keluarga Mahasiswa). Perlawanan

44. "Merju Suar 15 Juni 1966," *Koran Mertju Suar*, June 15, 1966.

45. "Merju Suar 6 Juli 1966," *Koran Mertju Suar*, July 6, 1966.

46. "Merju Suar 5 Agustus 1966," *Koran Mertju Suar*, Agustus 1966.

47. "Merju Suar 11 Agustus 1966," *Koran Mertju Suar*, August 11, 1966.

ini mendapat tentangan keras dari *caretaker* Dewan Mahasiswa UGM yang kemudian mendesak Rektor UGM untuk membekukan Kema. Dalam resolusinya KAMI juga menegaskan siapa saja baik pimpinan fakultas, dosen, dan asisten yang merestui dan membantu pembentukan Kema agar ditindak tegas oleh pihak Rektorat.<sup>48</sup> Seperti diberitakan oleh surat kabar *Suluh Marhaen*, pada September 1966 satu persatu Kema disetiap fakultas (total yang berdiri ada 11 fakultas) di UGM terbentuk yang diawali dari Fakultas Teknik (6 September), Fakultas Ekonomi (7 September), Fakultas Sospol (8 September), Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (9 September), Fakultas IPA (11 September), Fakultas Sastra dan Kebudayaan (14 September), Fakultas Teknologi Pertanian (15 September), Fakultas Farmasi (19 September), Fakultas Biologi (20 September), Fakultas Geografi dan Fakultas Kedokteran Gigi (26 September).<sup>49</sup> Padahal awalnya pembentukan Bakema (Badan Keluarga Mahasiswa) ini sendiri sudah disetujui oleh Rektor UGM.<sup>50</sup>

Pada akhirnya berselang kurang lebih dua tahun, mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya diberhentikan dari kampus satu persatu diterima kembali sebagai mahasiswa dengan fasilitas penuh. Dalam catatan arsip yang masih tersisa, mahasiswa Fakultas Kedokteran berjumlah 43 mahasiswa terhitung sejak 1 Agustus 1967 diterima kembali sebagai mahasiswa biasa dengan fasilitas penuh dan boleh mengikuti tentamen/ujian serta kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>51</sup> Hal serupa juga terjadi di Fakultas Teknik yaitu Dj. Radjagukguk dan Bob Rukmono dikembalikan statusnya sebagai mahasiswa penuh pada 4 April 1968 setelah sebelumnya menjalani masa percobaan sampai akhir Desember 1967.<sup>52</sup>

Tidak semua anggota CGMI *discreening* di kampus. Salah satunya adalah Sudarsi, mahasiswi senior jurusan Sastra Inggris yang juga menjadi pengurus CGMI. Ia ditangkap oleh tentara pada malam hari di rumahnya di Kertosono, Surakarta seminggu pasca meletusnya G30S. Ia ditahan di Solo, kemudian dipindahkan ke Yogyakarta dan berakhir di Plantungan.<sup>53</sup>

Ada pula kesaksian Sri Muhajati, mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum UGM angkatan 1961 yang juga anggota anggota CGMI. Dalam pengakuannya, ia tak pernah secara resmi mendaftar sebagai anggota CGMI, namun hanya bersimpati karena ayahnya merupakan anggota PKI dan duduk dalam keanggotan DPRD

---

48. "Merju Suar 22 September 1966," *Koran Mertju Suar*, September 22, 1966.

49. "Suluh Marhaen 7 September 1966," *Koran Suluh Marhein*, September 7, 1966; "Suluh Marhaen 12 September 1966," *Koran Suluh Marhein*, September 12, 1966; "Suluh Marhaen 15 September 1966," *Koran Suluh Marhein*, September 15, 1966; "Suluh Marhaen 16 September 1966," *Koran Suluh Marhein*, September 16, 1966; "Suluh Marhaen 21 September 1966," *Koran Suluh Marhein*, September 21, 1966; "Suluh Marhaen 27 September 1966," *Koran Suluh Marhein*, September 27, 1966.

50. "Suluh Marhaen 5 September 1966," *Koran Suluh Marhein*, September 5, 1966.

51. Rektor UGM, "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 67.12" (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1967).

52. "Surat Keputusan (SK) Ketua Presidium UGM No. 20 Tahun 1968" (Arsip Universitas Gadjah Mada, 1968).

53. Kesaksian Sudarsi dalam Ita Fatia Nadia, *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*, Cet. 1. (Yogyakarta : Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta: Galang Press ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2007), 114.

Yogyakarta. Saat terjadi huru-hara '65, ia sedang menjabat sebagai Bendahara I Kodema Fakultas Kedokteran Umum UGM. Namanya tercantum dalam SK Rektor yang memberhentikan sementara anggota-anggota CGMI dan Perhimi tertanggal 15 Oktober 1965. Sri mengaku tidak pernah melihat secara langsung pengumuman penonaktifan ini, apalagi dikirim surat resmi dari kampus. Ia hanya diberitahu temannya bahwa namanya tercantum dalam pengumuman yang terpasang di kampus Ngasem, lokasi dari Fakultas Kedokteran Umum saat itu.<sup>54</sup>

### 3.2. *Orientasi UGM Pasca Tragedi '65*

Dalam suatu kesempatan menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1966 Rektor UGM drg. Nazir Alwi berpidato yang isinya mengatakan bahwa UGM harus menjadi cermin kecermelangan Orde Baru.<sup>55</sup> Nazir menginginkan UGM menjadi pusat perkembangan kebudayaan nasional. Selain itu juga akan dilakukan *open management* dimana masyarakat boleh mengetahui segala kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh UGM. Kerjasama dengan semua instansi pun akan diperbaiki kembali. Dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya ide dari Nazir Alwi ini merupakan kepanjangan dari para penguasa Orde Baru nantinya, yaitu dengan slogan koreksi total atas segala kesalahan 'Orde Lama,' yang ditandai salah satunya dengan rencana akan kembali bekerjasama dengan instansi manapun, sebagaimana pemerintah Orde Baru kemudian kembali membuka hubungan dengan Amerika Serikat.

Secara keseluruhan dengan kondisi politik yang menuntut kesetiaan luar biasa pada haluan Negara, sebagaimana terjadi pada masa pemeritahan Soekarno pula, mau tidak mau UGM mengikuti segala slogan-slogan Orde Baru pula. Jika di masa Demokrasi Terpimpin slogan-slogan seperti 'revolusioner,' 'Manipol-Usdek,' menjadi bagian dari keseharian kampus, kini digantikan dengan kata-kata seperti 'pemurnian pelaksanaan Pancasila,' 'koreksi total terhadap Orde Lama,' dan slogan-slogan sejenis lainnya. Pada akhirnya hingga sekarang, dalam setiap acara orientasi kampus untuk mahasiswa baru (kini disebut PPSMB) selalu didengung-dengungkan bahwa UGM adalah Kampus Kerakyatan, istilah yang entah ditafsirkan seperti apa oleh petinggi kampus saat ini.

Kekisruhan pada masa peralihan ini tak hanya terjadi di UGM, namun menimpa hampir semua kampus-kampus besar di Indonesia. Dari sumber koran sezaman juga ditemukan fakta bahwa tindakan pemecatan mahasiswa maupun pembekuan Dewan Mahasiswa tidak hanya terjadi di UGM, namun kampus lain seperti IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Yogyakarta juga terkena imbas dari prahara 1965 ini. KAMI Perwakilan IKIP Yogya kembali melakukan aksi dengan mendesak rektor untuk melarang organisasi GERMINDO serta membersihkan Dewan Mahasiswa

---

54. Sri Muhajati, "Wawancara Aktivistis CGMI Dan Bendahara Kodema Fakultas Kedokteran Umum UGM, Di Jalan Wonosari Km. 7,8 Yogyakarta," December 9, 2015.

55. "Mertju Suar 16 Agustus 1966," *Koran Mertju Suar*, August 16, 1966.



IKIP dari unsur-unsur GMNI A-Su.<sup>56</sup> Kemudian pada 4 Juni 1966 menyusul desakan untuk memecat dosen-dosen IKIP antara lain Drs. Tarip Rustanto (Pembantu Rektor IV), Drs. Sudibjo (Dosen), Drs. Danarto (Dosen), Dra. Muharti (Pembantu Dekan II FKE), Drs. Soekur (Pemb. Dekan II FKT) dan Ir. Widodo (Dosen). Pernyataan ini bernomor 034/Acc/KAMI/66 dan ditandatangani oleh ketuanya Marwan Rusli, BA dan sekretaris Usmir Nashur.<sup>57</sup> Sempat muncul pula isu mengenai adanya gerakan terselebung yang dituduh Oleh Dewan Mahasiswa IKIP sebagai 'gerpol orde lama' dimotori oleh mahasiswa bernama Mamiiek Sudir dari Fakultas Ekonomi.<sup>58</sup>

Universitas Indonesia (UI) Jakarta membantah klaim dari GMNI Jakarta yang mengatakan bahwa ada 1000an anggotanya yang mahasiswa UI dipecat dari kampus. UI memberikan pernyataan melalui Keputusan Rektor UI no. 018/SK/BR//66 yang menyatakan bahwa hanya 13 mahasiswa yang dipecat dengan tidak hormat. Sejumlah 206 mahasiswa masih diberi kesempatan untuk naik banding ke Dewan Pertimbangan, 264 mahasiswa dilarang mengikuti kuliah dan kegiatan akademis sampai awal 1967, dan 670 mahasiswa diwajibkan melapor diri dan mengikuti indoktrinasi.<sup>59</sup>

Sedangkan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dikabarkan bahwa 124 mahasiswa eks CGMI dipecat dari kampus. Rektor Undip Prof. Ir. J. Rais memberikan rincian ke-124 mahasiswa itu berasal dari lima fakultas yaitu 76 orang dari FHPM, 9 orang dari F. Teknik, 18 orang dari F. Ekonomi, 16 orang dari F. Kedokteran dan 5 orang dari Fak. Peternakan.<sup>60</sup>

#### 4. Penutup

Suasana kampus yang panas, mengikuti perkembangan politik di tingkat nasional menjelang tahun 1965 memang pada akhirnya membawa dampak yang lumayan pelik bagi kehidupan kampus setelah pecah peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Khususnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai kampus milik pemerintah mau tidak mau harus dilakukan 'pembersihan' terhadap segala apa yang disebut 'kiri,' entah itu dalam bentuk fisik (organisasi massa, kegiatan politik, kampanye maupun orasi) dan secara pemikiran (orang-orang 'kiri' yang secara pemikiran berhaluan Marxisme).

Pembersihan kemudian dimulai dengan penonaktifan (istilah halus untuk pemecatan) para mahasiswa, dosen, maupun pegawai yang berafiliasi dengan organ-organ Partai Komunis Indonesia (PKI) dan disusul dengan propaganda dari pihak militer melalui berbagai cara. Misalnya saja, militer menyelenggarakan kuliah umum yang

56. "Mertju Suar 21 April 1966," *Koran Mertju Suar*, April 21, 1966.

57. "Merju Suar 9 Juni 1966," *Koran Mertju Suar*, June 9, 1966.

58. "Merju Suar 26 September 1966," *Koran Mertju Suar*, September 26, 1966.

59. "Merju Suar 5 Agustus 1966."

60. "Merju Suar 23 September 1966," *Koran Mertju Suar*, September 23, 1966.

dilaksanakan oleh Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo di Sitinggil Keraton Yogyakarta. Terbentuknya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) juga menjadi sangat berpengaruh bagi kehidupan kampus karena dengan semangat antikomunisnya KAMI dapat dengan leluasa memberikan daftar, tekanan, maupun tuntutan untuk memberhentikan mahasiswa maupun dosen yang dianggap sebagai bagian dari PKI maupun organisasi sayapnya.

Pada akhirnya dapat disimpulkan tiga hal, untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, bahwa: *Pertama*, telah terjadi suatu ketegangan besar dan kampus menjadi tidak kondusif, sebagaimana politik di tingkat nasional dan luar kampus pada umumnya, mengingat UGM secara khusus yang mempunyai mahasiswa dalam jumlah besar dengan bermacam-macam ideologi mahasiswanya. Ribuan civitas akademika di UGM diberhentikan, meskipun angka total yang valid belum dapat dipastikan karena terbatasnya sumber yang diperoleh. *Kedua*, pihak kampus, dalam hal ini Rektorat UGM mau tidak mau mengikuti kebijakan orang-orang yang saat itu merasa berkuasa untuk pada akhirnya menyingkirkan siapa pun yang tertuduh komunis dan simpatisannya, tak peduli bagaimana rekam jejak akademisnya. *Ketiga*, pasca 'pembersihan' unsur-unsur kiri, kondisi sosial dan politik di kampus UGM tidak jauh berbeda, namun panggung politik kampus menjadi utuh dikuasai oleh anggota KAMI minus organ mahasiswa kiri yang sebelumnya memang telah habis disingkirkan.

### Daftar Pustaka

- Husin, Lutfi Hamzah. *Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan: Keluarga Mahasiswa UGM Dari Masa Orde Lama Hingga Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: Polgov, 2014.
- Ibrahim, Julianto. "Goncangan Pada Keselarasan Hidup Di Kesultanan." In *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ita Fatia Nadia. *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*. Cet. 1. Yogyakarta : Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta: Galang Press ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2007.
- Krisnadi, I. G. *Tahanan politik Pulau Buru, 1969-1979*. Cet. 1. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Muhajati, Sri. "Wawancara Aktivistis CGMI Dan Bendahara Kodema Fakultas Kedokteran Umum UGM, Di Jalan Wonosari Km. 7,8 Yogyakarta," December 9, 2015.
- Raillon, Francois. *Politik Dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan Dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. LP3ES, 1989.
- Rektor UGM. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.13." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.14." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.15." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.19." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965.

- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.20." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 65.21." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1965.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 66.3." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1966.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 67.7." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1967.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No. 67.12." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1967.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No.68.14." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1968.
- — —. "Surat Keputusan (SK) Nomor Arsip: A5/OA.SK.05. No.68.31." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1968.
- Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Penerbit Serambi, 2008.
- Setiawan, Hersri. *Memoar Pulau Buru*. Cet. 1. Magelang: IndonesiaTera, 2004.
- Sumarmiyati, Christina. "Wawancara Eks Mahasiswa IKIP Yogyakarta Dan Aktivis IPPI Di Jl. Veteran, Yogyakarta," October 1, 2015.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Nyayi Sunyi Seorang Bisu*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Wahid, Abdul. "Campus on Fire: Indonesian Universities During the Political Turmoil of 1950s-1960s." *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, no. 95 (June 29, 2018): 31–52.
- Wardaya, F. X. Baskara Tulus. *Suara Di Balik Prahara: Berbagi Narasi Tentang Tragedi '65*. Cet. 1. Yogyakarta: Galangpress ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2011.
- Zainudin, Burhan. "Saya punya license to kill." In *Pengakuan algojo 1965*. Cetakan pertama. Jakarta: Tempo Publishing, 2013.
- "Kompas 3 Februari 1966." *Koran Kompas*. Jakarta, February 3, 1966.
- "Kompas 5 November 1965." *Koran Kompas*. Jakarta, November 5, 1965.
- "Kompas 9 Juni 1966." *Koran Kompas*. Jakarta, June 9, 1966.
- "Kompas 10 Januari 1966." *Koran Kompas*. Jakarta, January 10, 1966.
- "Merju Suar 2 Juni 1966." *Koran Mertju Suar*, June 2, 1966.
- "Merju Suar 5 Agustus 1966." *Koran Mertju Suar*, Agustus 1966.
- "Merju Suar 6 Juli 1966." *Koran Mertju Suar*, July 6, 1966.
- "Merju Suar 9 Juni 1966." *Koran Mertju Suar*, June 9, 1966.
- "Merju Suar 11 Agustus 1966." *Koran Mertju Suar*, August 11, 1966.
- "Merju Suar 15 Juni 1966." *Koran Mertju Suar*, June 15, 1966.
- "Merju Suar 22 Juni 1966." *Koran Mertju Suar*, June 22, 1966.
- "Merju Suar 22 September 1966." *Koran Mertju Suar*, September 22, 1966.
- "Merju Suar 23 September 1966." *Koran Mertju Suar*, September 23, 1966.
- "Merju Suar 26 September 1966." *Koran Mertju Suar*, September 26, 1966.
- "Mertju Suar 9 Mei 1966." *Koran Mertju Suar*, May 9, 1966.
- "Mertju Suar 10 Juni 1966." *Koran Mertju Suar*, June 10, 1966.

- "Mertju Suar 13 April 1966." *Koran Mertju Suar*, April 13, 1966.
- "Mertju Suar 16 Agustus 1966." *Koran Mertju Suar*, August 16, 1966.
- "Mertju Suar 16 April 1966." *Koran Mertju Suar*, April 16, 1966.
- "Mertju Suar 21 April 1966." *Koran Mertju Suar*, April 21, 1966.
- "Mertju Suar 25 April 1966." *Koran Mertju Suar*, April 25, 1966.
- "Mertju Suar 26 Mei 1966." *Koran Mertju Suar*, Mei 1966.
- "Mertju Suar 29 April 1966." *Koran Mertju Suar*, April 29, 1966.
- "Nasional 2 November 1965." *Koran Nasional*, November 2, 1965.
- "Nasional 18 Desember 1965." *Koran Nasional*, December 18, 1965.
- "Nasional 23 November 1965." *Koran Nasional*, November 23, 1965.
- "Nasional 28 Oktober 1965." *Koran Nasional*, n.d.
- "Suluh Indonesia 12 Januari 1966." *Koran Suluh Indonesia*, January 12, 1966.
- "Suluh Indonesia 15 Januari 1966." *Koran Suluh Indonesia*, January 15, 1966.
- "Suluh Indonesia 20 Januari 1966." *Koran Suluh Indonesia*, January 20, 1966.
- "Suluh Marhaen 5 September 1966." *Koran Suluh Marhein*, September 5, 1966.
- "Suluh Marhaen 7 September 1966." *Koran Suluh Marhein*, September 7, 1966.
- "Suluh Marhaen 12 September 1966." *Koran Suluh Marhein*, September 12, 1966.
- "Suluh Marhaen 15 September 1966." *Koran Suluh Marhein*, September 15, 1966.
- "Suluh Marhaen 16 September 1966." *Koran Suluh Marhein*, September 16, 1966.
- "Suluh Marhaen 21 September 1966." *Koran Suluh Marhein*, September 21, 1966.
- "Suluh Marhaen 27 September 1966." *Koran Suluh Marhein*, September 27, 1966.
- "Surat Keputusan (SK) Ketua Presidium UGM No. 20 Tahun 1968." Arsip Universitas Gadjah Mada, 1968.